

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAU, DAK DAN DANA DESA
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2024:
PENDEKATAN DYNAMIC PANEL DATA DENGAN SYSTEM GMM**

Andriansyah Hasibuan, Arwansyah

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email Korespondensi: hasibuan17042004@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization instruments, namely Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Village Fund (Dana Desa), on poverty levels in Indonesia, while simultaneously examining the phenomenon of the poverty trap. This research uses a dynamic panel data approach with the System Generalized Method of Moments (GMM) estimation. The data covers 34 provinces in Indonesia during the period of 2017 to 2024. The results indicate that the poverty level from the previous period has a positive and highly significant effect on current poverty, empirically confirming the existence of a structural poverty trap. Furthermore, PAD and DAU have no significant effect on poverty reduction. In contrast, DAK has a significant negative effect, proving to be the most effective instrument in reducing poverty through targeted basic infrastructure spending. However, the Village Fund shows an anomaly with a significant positive effect on poverty, indicating inefficiency in fund transformation that tends to be consumptive rather than promoting productive economic empowerment. The implication of this study emphasizes the need to reform DAU into a performance-based grant and optimize the Village Fund for human capital enhancement and micro-enterprise empowerment.

Keywords: Poverty Trap, Fiscal Decentralization, System GMM, Village Fund, Dynamic Panel Data.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen desentralisasi fiskal, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sekaligus menguji secara empiris fenomena jebakan kemiskinan (*poverty trap*). Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel dinamis dengan estimasi *System Generalized Method of Moments* (GMM). Data observasi mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2017 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan periode sebelumnya berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kemiskinan berjalan, mengonfirmasi eksistensi *poverty trap* secara struktural. Selanjutnya, PAD dan DAU terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Sebaliknya, DAK berpengaruh negatif dan signifikan, membuktikan diri sebagai instrumen paling efektif dalam mereduksi kemiskinan melalui alokasi belanja infrastruktur dasar yang spesifik. Namun, Dana Desa menunjukkan anomali dengan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan adanya inefisiensi transformasi dana di tingkat perdesaan yang cenderung digunakan untuk bantuan konsumtif dibandingkan dengan pemberdayaan ekonomi produktif. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi DAU menjadi skema berbasis kinerja dan optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK).

Kata kunci: Jebakan Kemiskinan, Desentralisasi Fiskal, *System GMM*, Dana Desa, Data Panel Dinamis.

PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan global yang paling kompleks dan persisten di abad ke-21, memengaruhi jutaan masyarakat di negara-negara berkembang (Todaro & Smith, 2020). Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) bahkan menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pertama (*Sustainable Development Goal 1*), sebagai fondasi krusial untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif (Hamidi et al., 2021). Di Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi makro menunjukkan tren yang relatif stabil, tantangan kemiskinan tetap substansial dengan tingkat ketimpangan yang tinggi dalam distribusi pendapatan serta akses terhadap layanan publik (BPS, 2024). Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional telah mengalami penurunan secara gradual dari 11,32% pada tahun 2017 menjadi 9,57% pada tahun 2024, namun kecepatan penurunan ini dinilai masih relatif lambat untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (BPS, 2024). Dinamika tren penurunan kemiskinan secara agregat nasional tersebut diilustrasikan secara visual dibawah ini.

Gambar 1: Tingkat Kemiskinan Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah (2025)

Teorisasi mengenai kemiskinan dalam lanskap ekonomi pembangunan telah mengalami pergeseran paradigma yang mendasar. Kemiskinan tidak lagi didefinisikan secara reduksionis sebatas komodifikasi materi atau rendahnya tingkat pendapatan absolut (*income poverty*). Berakar pada *capability approach* yang diformulasikan oleh (Sen, 2013), kemiskinan diartikan sebagai bentuk deprivasi kapabilitas dasar (*deprivation of basic capabilities*) yang membatasi kebebasan substansial individu untuk mengaktualisasikan fungsi-fungsi esensial hidup, seperti akses terhadap kesehatan yang layak, pendidikan berkualitas, dan pemenuhan nutrisi minimum. Keterbatasan kapabilitas ini secara kausalitas menciptakan lingkaran setan yang saling memperkuat (*self-reinforcing mechanisms*) yang dikenal sebagai fenomena perangkap kemiskinan (*poverty trap*). Dalam perspektif (Azariadis & Stachurski, 2005), *poverty trap* bekerja melalui kegagalan koordinasi intergenerasi, di mana agen ekonomi yang berada di bawah ambang batas aset tertentu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan investasi modal manusia (*human capital investment*) secara optimal. Akibatnya, produktivitas marjinal tenaga kerja tetap rendah, yang pada gilirannya mengunci pendapatan mereka di bawah garis kemiskinan pada masa depan. Eksistensi *path dependency* atau efek persistensi antarwaktu inilah yang memberikan landasan teoretis bahwa tingkat kemiskinan pada periode berjalan (POV_{it}) secara struktural sangat dipengaruhi oleh stok atau kondisi kemiskinan pada periode sebelumnya ($POV_{i,t-1}$).

Secara teoretis, kemiskinan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan rendahnya pendapatan atau *income poverty*, melainkan kondisi multidimensi yang mencakup deprivasi kapabilitas dasar manusia (Alkire & Foster, 2011). Landasan teoretis ini berakar kuat pada *capability approach*, yang memandang bahwa kemiskinan adalah hilangnya kebebasan substansial bagi individu untuk mencapai kapabilitas esensial dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Sen, 2013). Keterbatasan kapabilitas multidimensi ini sering kali menciptakan fenomena *poverty trap* atau perangkap kemiskinan, yaitu mekanisme yang saling memperkuat (*self-reinforcing*) akibat kegagalan pasar maupun institusi (Azariadis & Stachurski, 2005). Dalam kondisi ini, rumah tangga miskin mengalami keterbatasan aset serta minimnya akses terhadap kredit untuk investasi produktif, sehingga jerat kemiskinan cenderung bersifat persisten antargenerasi dan menciptakan ketergantungan antarwaktu atau *path dependency*.

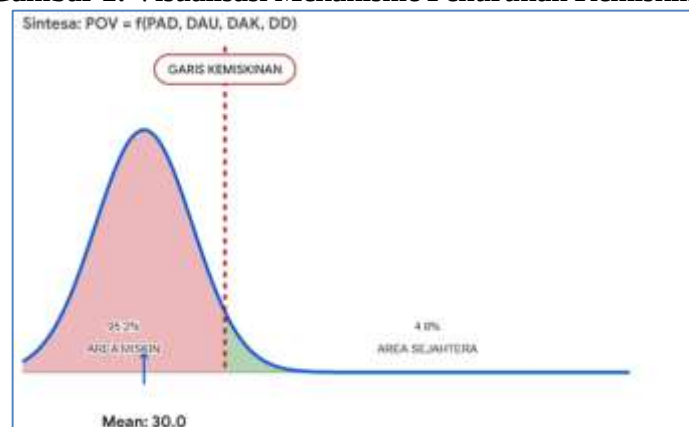
Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

(Banerjee & Duflo, 2007).

Untuk memutus rantai *poverty trap* tersebut, intervensi pemerintah melalui instrumen desentralisasi fiskal memegang peran redistributif yang sangat esensial (Mardiasmo, 2021). Kapasitas fiskal daerah yang direpresentasikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta instrumen transfer dari pusat yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa menjadi variabel pendanaan utama dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. PAD merupakan ukuran kemandirian fiskal yang memberikan ruang atau *fiscal space* bagi pemerintah daerah untuk mendanai program *pro-poor* secara mandiri (Kusuma & Anwar, 2024). Sementara itu, DAU dirancang sebagai instrumen pemerataan (*equalization*) yang tidak mengikat (*block grant*) untuk memastikan setiap daerah memiliki kapasitas fiskal minimum (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024). DAK berfungsi sebagai *specific grant* yang penggunaannya diikat secara ketat pada sektor prioritas nasional seperti infrastruktur kesehatan dan pendidikan dasar (Dimas Ariyawan Santoso et al., 2025). Terakhir, Dana Desa hadir sebagai skema transfer desentralistik langsung ke level administrasi perdesaan untuk mendorong pembangunan infrastruktur lokal dan pemberdayaan masyarakat, khususnya sebagai pendorong stimulasi ekonomi bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) (Wahyudi & Khotimah, 2022). Secara grafis, intervensi instrumen fiskal ini diharapkan mampu bertindak sebagai guncangan pendapatan positif (*positive income shock*) yang menggeser kurva distribusi pendapatan masyarakat menjauhi ambang batas kemiskinan, sebagaimana divisualisasikan pada berikut.

Gambar 2: Visualisasi Mekanisme Penurunan Kemiskinan



Meskipun kerangka teoretis tersebut menjanjikan korelasi positif antara instrumen fiskal dan penurunan angka kemiskinan, berbagai studi empiris menunjukkan paradoks dan heterogenitas dampak. Penelitian menemukan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena kemandirian fiskal menciptakan alokasi layanan publik yang lebih optimal (Nurrisqi et al., 2023). Namun, temuan lain menyanggah hal tersebut dengan membuktikan bahwa efektivitas PAD sangat bersyarat pada kualitas tata kelola dan tidak selalu signifikan (Dinarjito & Dharmazi, 2020). Demikian pula halnya dengan instrumen transfer dana dari pusat, DAK terbukti secara konsisten efektif mereduksi kemiskinan akibat penguncian spesifik pada belanja prioritas (Paulus et al., 2019), sementara efektivitas DAU sering kali tidak signifikan karena kerap terabsorpsi dalam ketidakefisienan belanja operasional birokrasi daerah (Ulfiah Syukri et al., 2025). Temuan terkait efektivitas Dana Desa juga bervariasi, di mana beberapa riset menemukan dampak positif yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja perdesaan (Herlina, 2025), sedangkan studi lainnya menemukan efektivitas yang rendah akibat minimnya kompetensi manajerial dari aparatur desa di wilayah tertentu (Sari & Irama, 2018).

Inkonsistensi temuan dari berbagai penelitian terdahulu menciptakan celah (*research gap*) yang krusial, terutama karena kebijakan fiskal memiliki efek jeda (*lag effects*) di mana dampak nyata terhadap kesejahteraan memerlukan proses implementasi yang memakan waktu (Tinambunan et al., 2020). Isu endogenitas atau kemungkinan adanya hubungan kausalitas dua arah antara besaran transfer dana yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

237

Indexed

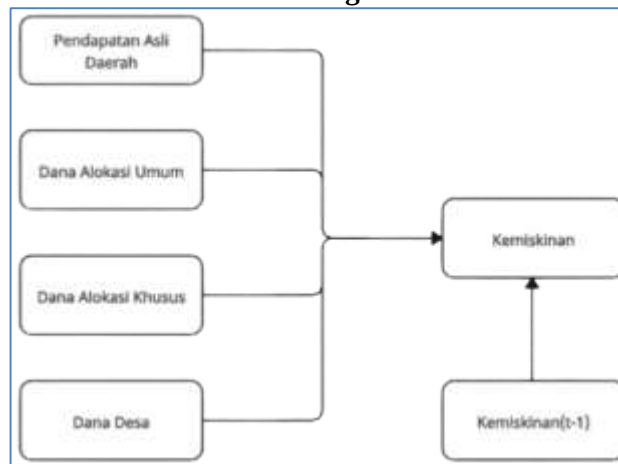
SINTA 4



diterima daerah dan fluktuasi tingkat kemiskinannya sering kali diabaikan oleh penelitian terdahulu yang bertumpu pada estimasi panel statis seperti *Fixed Effects* (Ullah et al., 2018).

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia selama periode 2017-2024 dengan pendekatan *dynamic panel data* menggunakan estimasi *System Generalized Method of Moments* (GMM). Penggunaan metode *System GMM* dipandang paling relevan untuk mengakomodasi efek dinamis persistensi kemiskinan masa lalu sekaligus mengeliminasi masalah bias endogenitas dari instrumen fiskal (Arellano & Bond, 1991; Syaifudin et al., 2024). Seluruh kerangka pemikiran dinamis dan arah hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dirangkum pada gambar berikut.

Gambar 3: Kerangka Penelitian



Sejalan dengan kerangka konseptual tersebut, hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

1. (H1) PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
2. (H2) DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
3. (H3) DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
4. (H4) Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
5. (H5) Tingkat kemiskinan periode sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan berjalan yang menegaskan eksistensi *poverty trap*.

Kerangka teoretis desentralisasi fiskal menjanjikan dampak linier terhadap peningkatan kesejahteraan, literatur empiris justru menunjukkan konstelasi hasil yang sangat kontradiktif dan fragmentaris. Pada satu kelompok literatur, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nurrisqi et al., 2023) dan (Paulus et al., 2019) mengonfirmasi pandangan konvensional bahwa peningkatan PAD dan alokasi transfer khusus seperti DAK secara efektif mampu mereduksi angka kemiskinan melalui saluran perbaikan infrastruktur publik. Namun, pandangan ini ditentang keras oleh kelompok literatur kedua. Dinarjito dan Dharmazi (2020) memberikan bukti empiris bahwa peningkatan PAD sering kali tidak berkorelasi dengan penurunan kemiskinan karena adanya distorsi tata kelola (*governance deficit*) di tingkat lokal. Lebih jauh, transfer umum seperti DAU kerap kali memicu fenomena *flypaper effect*, di mana pemerintah daerah cenderung meningkatkan belanja operasional birokrasi dan belanja pegawai secara tidak produktif daripada mengalokasikannya untuk sektor perlindungan sosial, sebuah tesis yang diperkuat oleh temuan (Ulfiah Syukri et al., 2025). Heterogenitas dampak yang serupa juga melingkupi kajian mengenai Dana Desa. Sementara (Herlina, 2025) melihat Dana Desa sebagai stimulus positif pengentasan kemiskinan pedesaan, riset kritis dari (Sari & Irama, 2018) justru menunjukkan bahwa Dana Desa tidak memiliki dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan struktural akibat rendahnya kapasitas manajerial aparat desa dan tingginya inefisiensi alokasi dana yang bersifat konsumtif.

Inkonsistensi empiris yang tajam ini mengindikasikan adanya celah metodologis (*methodological gap*) yang serius dalam penelitian-penelitian terdahulu. Mayoritas studi empiris sebelumnya mengabaikan sifat dinamis dari kemiskinan dengan mengandalkan estimasi data panel statis seperti *Fixed Effects Model* (FEM) atau *Random Effects Model* (REM). Pendekatan statis ini tidak hanya gagal menangkap efek *path dependency* dari *poverty trap*, tetapi juga mengabaikan ancaman bias endogenitas yang bersumber dari hubungan kausalitas dua arah (*reverse causality*); di mana besaran transfer fiskal dari pemerintah pusat sering kali ditentukan oleh tinggi rendahnya angka kemiskinan di daerah tersebut. Jika masalah endogenitas ini diabaikan, maka koefisien parameter yang dihasilkan dipastikan bias dan tidak konsisten (*spurious regression*). Mengatasi keterbatasan literatur tersebut, penelitian ini memosisikan kebaruannya (*novelty*) dengan mengintegrasikan variabel kemiskinan masa lalu ($POV_{i,t-1}$) ke dalam model data panel dinamis melalui pendekatan estimator *One-step System Generalized Method of Moments* (*System GMM*) yang dikembangkan oleh (Blundell & Bond, 1998). Metode ini secara simultan mengeksplorasi instrumen *lag* internal untuk mengeliminasi bias endogenitas, mengontrol efek spesifik wilayah yang tidak terobservasi (*unobserved individual effects*), dan menguji kondisi stabilitas model secara asimtotik pada 34 provinsi di Indonesia selama periode krusial 2017–2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *dynamic panel data*. Data observasi merupakan data sekunder berbentuk panel seimbang (*balanced panel*) yang mencakup populasi penuh 34 provinsi di Indonesia selama periode 2017–2024 (272 titik observasi). Data bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan (POV_{it}). Variabel independen terdiri dari tingkat kemiskinan periode sebelumnya ($POV_{i,t-1}$) untuk menangkap efek persistensi, serta instrumen fiskal yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa. Guna menormalisasi data serta mengatasi nilai ekstrem (*outliers*) dan observasi bernilai nol (ketiadaan Dana Desa di DKI Jakarta), variabel PAD ditransformasikan ke dalam logaritma natural ($\ln$), sedangkan DAU, DAK, dan Dana Desa ditransformasikan menggunakan proksi *Inverse Hyperbolic Sine* (IHS).

Secara matematis, spesifikasi model estimasi dirumuskan ke dalam persamaan berikut:

$$POV_{it} = \rho(POV)_{i,t-1} + \beta_1 \ln_PAD_{it} + \beta_2 IHS_DAU_{it} + \beta_3 IHS_DAK_{it} + \beta_4 IHS_DanaDesa_{it} + \alpha_i + \lambda_t + u_{it}$$

Penyelesaian persamaan tersebut dieksekusi menggunakan estimasi *One-step System Generalized Method of Moments* (*System GMM*) berbantuan perangkat lunak EViews 12. Pendekatan GMM dipilih secara khusus karena kemampuannya dalam mengeliminasi bias endogenitas yang sering terjadi pada transfer fiskal, sekaligus mengatasi bias asimtotik (bias Nickell) akibat penggunaan variabel *lagged dependent*. Untuk memastikan estimator bersifat konsisten dan valid, spesifikasi model dikalibrasi secara ketat melalui empat uji diagnostik asimtotik: (1) *Arellano-Bond Test* untuk memastikan ketiadaan autokorelasi pada *error term* orde kedua (AR(2)); (2) *Sargan/Hansen J-Test* untuk memvalidasi eksogenitas instrumen tambahan (*overidentifying restrictions*); (3) *Instrument Proliferation Check* untuk mencegah *overfitting* di mana jumlah instrumen (≤ 21) harus lebih kecil dari jumlah grup observasi, serta (4) *Stability Condition Check* untuk memastikan interaksi antarwaktu model tidak bersifat eksplosif ($-1 < \rho < 1$).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Hasil Uji Diagnostik Ekometrika

Secara spasial, distribusi kesejahteraan di Indonesia selama periode 2017-2024 menunjukkan ketimpangan yang berakar pada karakteristik geografis dan kapasitas fiskal awal (*baseline*) masing-masing daerah. Ketimpangan ini dapat diamati melalui persebaran 34 provinsi yang menjadi unit observasi dalam penelitian ini, sebagaimana divisualisasikan pada berikut.

Gambar 4: Peta Distribusi Spasial 34 Provinsi di Indonesia



Provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya Pulau Jawa, cenderung memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masif akibat aglomerasi industri, yang memberikan ruang fiskal luas untuk program pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, mayoritas provinsi di luar Pulau Jawa memiliki derajat ketergantungan fiskal (*fiscal dependence*) yang sangat tinggi terhadap kucuran dana transfer pusat (DAU, DAK, dan Dana Desa) akibat terbatasnya basis pajak lokal (Awaludin & Wibowo, 2023). Dinamika ketimpangan spasial dan injeksi fiskal inilah yang kemudian diestimasi menggunakan model *System GMM*.

Uji Diagnostik Model *System GMM*

Sebelum menginterpretasikan pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap tingkat kemiskinan, estimasi *System GMM* mewajibkan pemenuhan serangkaian uji diagnostik. Rangkaian pengujian ini berfungsi sebagai syarat asimtotik mutlak untuk memastikan bahwa model bersifat konsisten, instrumen *lag* yang digunakan valid, dan estimator tidak bias. Ringkasan hasil uji diagnostik disajikan pada berikut.

Tabel 1: Uji Diagnostik *System GMM*

Jenis Pengujian	Parameter Evaluasi	Nilai Statistik	Probabilitas	Kesimpulan
<i>Arellano-Bond Test</i>	<i>AR(2) m-Statistic</i>	-1.2555	0.2093	Terbebas dari Autokorelasi
<i>Sargan/Hansen J-Test</i>	<i>J-Statistic</i>	24.4336	0.0804	Seluruh Instrumen Valid
<i>Proliferation Check</i>	<i>Instrument Rank</i>	21	-	Terbebas dari <i>Overfitting</i>
<i>Stability Condition</i>	<i>Coef. KEMISKINAN(-1)</i>	0.8439	0.0000	Model Stabil Asimtotik

Berdasarkan Tabel 1, penjabaran dari masing-masing tahapan pengujian diagnostik adalah sebagai berikut.

1. Uji Autokorelasi (*Arellano-Bond Serial Correlation Test*)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Pengujian ini mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi pada *error term* tingkat *first difference*. Hasil estimasi menunjukkan probabilitas AR(2) sebesar 0,2093, yang lebih besar dari ambang batas signifikansi 0,05. Hal ini mengonfirmasi bahwa secara statistik model terbebas dari masalah autokorelasi orde kedua, yang merupakan syarat esensial agar estimasi GMM tidak bias (Arellano & Bond, 1991).

2. Uji Validitas Instrumen (*Hansen J-Test*)

Uji ini memastikan kondisi *overidentifying restrictions*, di mana seluruh instrumen tambahan harus bersifat eksogen. Nilai probabilitas *J-Statistic* sebesar 0,0804 ($> 0,05$) membuktikan bahwa instrumen yang dibentuk dari *lag* variabel internal adalah valid dan tidak memiliki korelasi dengan *error term* (Blundell & Bond, 1998).

3. Pengecekan Proliferasi Instrumen (*Instrument Proliferation Check*)

Penggunaan *lag* yang masif berisiko melemahkan uji Hansen dan memicu *overfitting*. Aturan mutlak menetapkan bahwa jumlah instrumen tidak boleh melebihi jumlah unit *cross-section*. Dengan jumlah instrumen sebanyak 21, yang jauh lebih kecil dibandingkan 34 provinsi observasi ($21 \leq 34$), model ini dinyatakan aman dari jebakan proliferasi instrumen (Roodman, 2009).

4. Uji Stabilitas Model (*Stability Condition Check*)

Spesifikasi model dinamis mengharuskan koefisien dari *lagged dependent* bernilai tidak eksplosif. Koefisien tingkat kemiskinan masa lalu bernilai 0,8439 (berada di dalam rentang $-1 < \rho < 1$) dengan probabilitas signifikan, yang menegaskan bahwa interaksi antarwaktu dalam model ini bersifat stabil dan akan meluruh menuju titik keseimbangan jangka panjang.

Hasil Estimasi System GMM

Setelah model dinyatakan valid, konsisten, dan tidak bias, analisis dilanjutkan pada interpretasi regresi utama yang merangkum pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan. Hasil estimasi *System GMM* disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2: Hasil Estimasi Regresi System GMM

Variabel Independen	Simbol	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Kemiskinan (t-1)	Kemiskinan(-1)	0.84392	0.059734	14.1280	0.0000
Log Pendapatan Asli Daerah	ln_pad	0.01240	0.146343	0.08477	0.9330
IHS Dana Alokasi Umum	ihs_dau	-0.12667	0.116672	-1.08568	0.2855
IHS Dana Alokasi Khusus	ihs_dak	-0.90837	0.249044	-3.64742	0.0009
IHS Dana Desa	ihs_danadesa	1.14192	0.241907	4.72050	0.0000

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian hipotesis menunjukkan temuan yang sangat bervariasi. Variabel tingkat kemiskinan periode sebelumnya menunjukkan nilai probabilitas 0,0000 dengan arah koefisien positif (0,8439), yang berarti H5 diterima. Sementara itu, variabel PAD (Prob. 0,9330) dan DAU (Prob. 0,2855) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan, sehingga H1 dan H2 ditolak. Pada variabel transfer spesifik, DAK menunjukkan nilai probabilitas 0,0009 dengan koefisien negatif (-0,9083), yang secara empiris mengonfirmasi bahwa DAK signifikan menurunkan kemiskinan (H3 diterima). Sebaliknya, variabel Dana Desa menunjukkan anomali statistik, meskipun nilainya sangat signifikan (Prob. 0,0000), arah koefisiennya bernilai positif (1,1419), yang mengindikasikan bahwa kucuran Dana Desa justru berasosiasi dengan tren peningkatan kemiskinan pada periode tersebut (H4 ditolak).

Temuan empiris ini mengonfirmasi sekaligus memberikan kritik terhadap efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan penjabaran interpretasi ekonomi sebagai berikut:

1. Eksistensi *Poverty Trap* (Jebakan Kemiskinan)

Signifikansinya variabel tingkat kemiskinan periode sebelumnya (POV_{t-1}) membuktikan keberadaan *poverty trap* secara struktural di 34 provinsi di Indonesia. Tingginya koefisien positif ini sejalan dengan teori Amartya Sen mengenai deprivation kapabilitas dasar. Keterbatasan rumah tangga miskin pada masa lalu dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan modal langsung membatasi produktivitas mereka di masa kini. Residu kemiskinan antargenerasi ini membuktikan bahwa kemiskinan tidak dapat diputus hanya dengan intervensi jangka pendek dalam satu periode anggaran (Syarifudin et al., 2024).

2. Inefisiensi Kemandirian Fiskal (PAD) dan *Block Grant* (DAU)

Tidak signifikannya pengaruh PAD dan DAU menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PAD, yang seharusnya menciptakan ruang fiskal lokal untuk mendanai kebijakan *pro-poor*, pada praktiknya kerap digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan atau proyek infrastruktur mercusuar yang tidak menyentuh masyarakat lapis bawah secara langsung (Dinarjito & Dharmazi, 2020). Demikian pula dengan DAU, sebagai dana *block grant* yang pengalokasiannya bersifat tidak mengikat, DAU terbukti belum menjadi instrumen redistribusi yang inklusif. Pemerintah daerah cenderung terjebak dalam inefisiensi alokasi, di mana transfer DAU terserap habis untuk belanja pegawai (gaji birokrasi daerah) alih-alih dialokasikan sebagai belanja perlindungan sosial (Ulfiah Syukri et al., 2025).

3. Keberhasilan Intervensi *Specific Grant* (DAK)

Temuan ini membuktikan secara brilian efektivitas teori spesifisitas belanja publik. Berbanding terbalik dengan DAU yang fleksibel, DAK adalah dana transfer bersyarat (*specific grant*) yang mekanisme belanjanya dikunci secara ketat oleh pemerintah pusat. Karena aliran dananya dipaksa untuk langsung membiayai sektor riil pembangunan manusia seperti rehabilitasi Puskesmas, ruang kelas sekolah, dan sarana air bersih. DAK terbukti sukses menaikkan kapabilitas kelompok rentan. Alokasi wajib untuk infrastruktur dasar ini menjadikannya instrumen desentralisasi paling tajam dalam mereduksi ketimpangan aksesibilitas ekonomi regional (Potale et al., 2024).

4. Anomali Efektivitas Dana Desa

Ditolaknya hipotesis keempat (H4) dengan koefisien Dana Desa yang bernilai positif dan signifikan mengungkap fakta empiris bahwa pada periode 2017-2024, peningkatan Dana Desa justru berkorelasi dengan persistensi kemiskinan. Anomali ini dapat dirasionalisasi melalui beberapa fenomena struktural dan situasional. Pertama, terjadi inefisiensi transformasi dana akibat rendahnya kapasitas manajerial aparatur perdesaan. Kucuran anggaran lebih sering dialokasikan secara instan pada proyek fisik berjangka pendek, dan gagal dikonversi menjadi pendampingan teknis yang berkelanjutan bagi sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) yang dikelola oleh masyarakat desa. Tanpa adanya pemberdayaan UMK sebagai penyangga ekonomi riil, *multiplier effect* dari dana desa menjadi sangat marginal. Kedua, periode penelitian ini menangkap guncangan pandemi COVID-19, di mana terjadi kebijakan *refocusing* Dana Desa menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT-Desa). Meskipun berfungsi menolong daya beli sementara, instrumen ini bersifat sangat konsumtif dan menggerus porsi anggaran yang seharusnya digunakan untuk investasi modal produktif. Akibatnya, alih-alih keluar dari jebakan kemiskinan, terjadi peningkatan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan langsung pemerintah (Wahyudi & Khotimah, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menggunakan pendekatan *System Generalized Method of Moments* (GMM) terhadap 34 provinsi di Indonesia periode 2017-2024, dapat disimpulkan bahwa dinamika kemiskinan regional di Indonesia sangat dipengaruhi oleh efek persistensi dan efektivitas instrumen desentralisasi fiskal yang heterogen. Temuan penelitian membuktikan secara empiris eksistensi fenomena *poverty trap* (jebakan kemiskinan) di mana tingkat kemiskinan masa lalu menjadi determinan utama kemiskinan periode berjalan. Hal ini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi jangka pendek tanpa upaya memutus rantai deprivasi kapabilitas antarwaktu.

Efektivitas instrumen desentralisasi fiskal menunjukkan hasil yang kontradiktif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti gagal memberikan dampak signifikan terhadap reduksi kemiskinan, yang mengindikasikan adanya inefisiensi alokasi APBD yang masih didominasi oleh belanja birokrasi dan operasional pemerintahan. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) terbukti menjadi instrumen fiskal paling tajam dalam menurunkan kemiskinan karena sifatnya yang terkunci pada sektor riil pembangunan manusia. Sementara itu, Dana Desa menunjukkan anomali dengan pengaruh positif terhadap kemiskinan, yang mencerminkan lemahnya transformasi dana di tingkat perdesaan yang masih bias pada pembangunan fisik estetis dan bantuan konsumtif, sehingga gagal menstimulasi pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat.

Sebagai implikasi kebijakan, pemerintah pusat perlu melakukan redesain terhadap skema Dana Alokasi Umum (DAU) dengan menggeser sifatnya dari *block grant* murni menjadi *performance-based grant* yang dikaitkan dengan capaian indikator kesejahteraan daerah. Optimalisasi DAK harus terus dipertahankan dan diperluas cakupannya pada sektor-sektor yang meningkatkan produktivitas jangka panjang. Di tingkat perdesaan, kementerian terkait perlu melakukan evaluasi fundamental terhadap penggunaan Dana Desa agar beralih dari pembangunan infrastruktur fisik semata menuju penguatan kapasitas sumber daya manusia dan inkubasi nyata bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana publik yang digelontorkan mampu menjadi daya ungkit bagi masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan secara permanen. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengintegrasikan variabel kelembagaan dan mempertimbangkan efek limpahan antarwilayah melalui pendekatan *Spatial Dynamic Panel Data* untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik mengenai dinamika kemiskinan lintas provinsi.

REFERENSI

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487. <https://doi.org/10.1016/J.JPUBECO.2010.11.006>
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. *The Review of Economic Studies*, 58(2), 277. <https://doi.org/10.2307/2297968>
- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 445–469. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.645>
- Azariadis, C., & Stachurski, J. (2005). *Chapter 5 Poverty Traps*. 295–384. [https://doi.org/10.1016/S1574-0684\(05\)01005-1](https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01005-1)
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2007). The Economic Lives of the Poor. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 141–167. <https://doi.org/10.1257/jep.21.1.141>
- Bellemare, M. F., & Wichman, C. J. (2020). Elasticities and the Inverse Hyperbolic Sine Transformation. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 82(1), 50–61. <https://doi.org/10.1111/obes.12325>
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 87(1), 115–143. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(98\)00009-8](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

243

Indexed



- BPS. (2024a). *Penghitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia*.
- BPS. (2024b). *Profil Kemiskinan di Indonesia*.
- BPS. (2025a). *Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS*.
- BPS. (2025b). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen*.
- BPS. (2025c). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)*.
- d'Agostino, G., Dunne, J. P., & Pieroni, L. (2016). Government Spending, Corruption and Economic Growth. *World Development*, 84, 190–205. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.03.011>
- Dimas Ariyawan Santoso, Maya Widyana Dewi, & Sri Laksmi Pardanawati. (2025). PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 64–74. <https://doi.org/10.69714/9608hx36>
- Dinarjito, A., & Dharmazi, A. (2020). PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *LAPORAN KINERJA DJPK TAHUN 2024*.
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195–225. <https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>
- François Bourguignon. (2003). *The Poverty-Growth-Inequality Triangle*. MIT PRESS.
- Hamidi, U. S., Puspita, D., Dewi Puspita, », Pahlevi, M., Raharja, M., Hadi, S., Latief Baroto, A., Permana, A. W., & Rahayu, W. T. (2021). *Two Decades of Fiscal Decentralization Implementation in Indonesia Editors: United States Agency for International Development Economic Growth Support Activity (USAID EGSA)*.
- Haughton, J. Henry., & Khandker, S. R. . (2009). *Handbook on poverty and inequality*. World Bank.
- Herlina, V. (2025). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Sitinjau Laut Kab. Kerinci. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 5(1), 68–73. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v5i1.68>
- Kalpika Sunu, M. K., & Suyana Utama, M. (2019). PENGARUH DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 843. <https://doi.org/10.24843/EEB.2019.v08.i08.p02>
- Kemenkeu. (2024). *APBN-KiTa-Agustus-2024-V4*.
- Kemenkeu. (2025a). *POSTUR APBD*.
- Kemenkeu. (2025b). *POSTUR TKDD*.
- Kementerian Keuangan. (2024). *2024pmkeuangan108*.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Ekonomi pembangunan : teori, masalah, dan kebijakan*. Unit Penerbit dan Percetakan, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2024). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 223–233. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art14>
- Lio Satria Putra Perkasa; George M. V. Kawung; Steeva Y. L. Tumangkeng. (2021). ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA . *Jurnal EMBA*, 09(1), 503–514.
- Mansuri, Ghazala., & Rao, Vijayendra. (2013). *Localizing development : does participation work?* World Bank.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru (edisi terbaru)*. Andi.
- Marihot Nasution. (2020). *KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH & HUBUNGANNYA DENGAN*

- BELANJA PEMERINTAH: STUDI DI INDONESIA Inequality between Regions & Their Relationship with Government Expenditures: A Study in Indonesia* Marhot Nasution (Vol. 5, Number 2).
- National Human Development Report. (2024). *Colombia at a Crossroad: Navigating Regional Divides and Embracing Opportunities*.
- Nurlaili, M. Y. S. E. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(2), 178–187. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i2.20457>
- Nurizqi, F. A., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 148–163. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.444>
- Pal, S., & Wahhaj, Z. (2017). Fiscal decentralisation, local institutions and public good provision: evidence from Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 383–409. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2016.07.004>
- Paulus, D. I. S., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). ANALISIS PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP KEMISKINAN MELALUI BELANJA DAERAH DI KOTA BITUNG. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 19(2). <https://doi.org/10.35794/jpekd.15781.19.2.2017>
- Peraturan Perundang-undangan. (2004, October 15). *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Pikiran Rakyat. (2025, December 18). *KPPOD: Otonomi Daerah Terancam Mundur, Efisiensi Anggaran hingga Wacana Pilkada DPRD Jadi Sorotan*. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1538>
- Potale, A., Dai, S. I. S., & Santoso, I. R. (2024). ANALISIS STRUKTUR BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 92–105. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v17i2.27313>
- Prasetya, D., Rizky Deco Praha, Aqilatul Layyindah, Irvan Tengku Harja, Eka Afrina Djamhari, Ah Maftuchan, Victoria Fanggidae, Herni Ramdhaningrum, Muto Sagala, & Andhika Nurwin Maulana. (2023). *Indeks Kemiskinan Multidimensi di 34 Provinsi di Indonesia 2012-2021* (R. Bambang Nurjaman, Ed.). Perkumpulan PRAKARSA.
- Purnawan, B. I., Monica, M., & Anggriani, R. (2025). MENAKAR KEMISKINAN MULTIDIMENSI DALAM PEMBANGUNAN KOTA DAN WILAYAH: HUMAN POVERTY INDEX SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN. *Jurnal Abdimas UM Jambi*, 2(2), 77–84. <https://doi.org/10.53978/jaum.v2i2.618>
- Ravallion, Martin. (2016). *The economics of poverty : history, measurement, and policy*. Oxford University Press.
- Roni Yanto, H. A. K. F. A. (2026). Pengaruh Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (Bukti Empiris Data Panel Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024). *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 5378–5384.
- Roodman, D. (2009). A Note on the Theme of Too Many Instruments *. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 71(1), 135–158. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2008.00542.x>
- Rosmeli, R., & Nurhayani, N. (2014). STUDI KOMPERATIF KETIMPANGAN WILAYAH ANTARA KAWASAN BARAT INDONESIA DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 3(1), 456–463. <https://doi.org/10.22437/jmk.v3i1.1861>
- Sari, R. D., & Irama, O. N. (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan*.
- Sen, A. (1985). Well-Being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984. *The Journal of Philosophy*, 82(4), 169. <https://doi.org/10.2307/2026184>
- Sen, Amartya. (2013). *Development as freedom*. Oxford University Press.

- Sennoga, E. B., & Matovu, J. M. (2010). *Give to AgEcon Search PUBLIC SPENDING COMPOSITION AND PUBLIC SECTOR EFFICIENCY: IMPLICATIONS FOR GROWTH AND POVERTY REDUCTION IN UGANDA*. <http://ageconsearch.umn.edu>
- Shafira Noor Fathiyyah. (2021). *PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMISKINAN PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA* [Thesis]. Universitas Brawijaya.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Syaifudin, R., Alfari, M. S., Fitriani, F., Putri, G. S. R., Jabbar, M. A., Malik, A., & Zulfa, F. N. (2024). Determinan Ketimpangan Wilayah di Indonesia Tahun 2012–2022: Pendekatan Analisis Panel Dinamis. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 5(2), 129–137. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i2.5143>
- Tinambunan, E. victara, Muhammad Findi, & Yeti Lis Purnamadewi. (2020). Dampak Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2013 – 2017. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 8(1), 20–42. <https://doi.org/10.29244/jekp.8.1.2019.20-42>
- Todaro, M. P. ., & Smith, S. C. . (2020). *Economic development*. Pearson.
- Ulfiah Syukri, Sofiaturohmah, S., & Kasman, A. (2025). Efisiensi Fiskal dan Dampaknya terhadap Transfer Dana Daerah: Analisis Kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025. *Journal of Governance Innovation*, 7(1), 347–359. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v7i1.6832>
- Ullah, S., Akhtar, P., & Zaefarian, G. (2018). Dealing with endogeneity bias: The generalized method of moments (GMM) for panel data. *Industrial Marketing Management*, 71, 69–78. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.11.010>
- Wahyudi, H., & Khotimah, S. N. (2022). Pengaruh Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 45–57. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1423>
- World Bank. (2026). *Indonesia economic update: Poverty and inequality platform*.
- Wu, Z., Long, H., & Song, H. (2024). The impact of infrastructure investment on multidimensional poverty. Evidence from Chinese rural migrant workers. *Economic Systems*, 48(3), 101239. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2024.101239>